

## GLOBALISASI, PENDIDIKAN KARAKTER DAN KEARIFAN LOKAL YANG *HYBRID* ISLAM PADA ORANG MELAYU KALIMANTAN BARAT

Syamsul Kurniawan

Institut Agama Islam Negeri Pontianak

*syamsulkurniawan001@gmail.com*

### Abstrak

*PADA era globalisasi, seperti saat ini, di mana jati diri sebuah bangsa sedang diuji, membangun karakter menjadi sebuah kebutuhan. Hal ini menjadi alasan pentingnya pendidikan karakter diberikan tidak hanya di rumah atau sekolah, tetapi juga di masyarakat. Khususnya masyarakat, dapat menjadi pusat pendidikan karakter oleh sebab di dalam keseharian masyarakat memiliki kearifan lokal yang dapat digali sebagai basis pendidikan karakter. Seperti orang Melayu Kalimantan Barat, yang mempunyai kearifan lokal, yang masih digenggam kuat dalam keseharian mereka sebagai Melayu. Kearifan lokal yang dianut oleh orang Melayu Kalimantan Barat sangat dekat dengan Islam, mengingat keterhubungan antara identitas Melayu dan Islam. Kearifan lokal ini lahir, bertumbuh dan berkembang di kalangan orang Melayu Kalimantan Barat dan berwarna hybrid, karena terjadi perpaduan kearifan lokal dengan nilai-nilai Islam. Di antara variannya yang dibahas dalam artikel ini, yaitu hukum adat Melayu, pantang larang, dan upacara adat.*

**Kata Kunci:** *Globalisasi, Pendidikan Karakter, Kearifan Lokal, Hybrid Islam.*

## A. Pendahuluan

Globalisasi mempengaruhi hampir semua aspek yang ada pada masyarakat, termasuk di antaranya aspek kearifan lokal. Pada zaman globalisasi, budaya-budaya dunia saling berbagi dan berebut pengaruh, dan terjadi dengan sangat cepat dan mudah, seperti melipat kertas dalam istilah Yasraf Amir Piliang.<sup>1</sup> Mengingat globalisasi adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari, yang harus dilakukan menurut Qodri Azizy, adalah respon, bukan lari menjauhi.<sup>2</sup>

Di zaman globalisasi, orang Melayu dihadapkan pada tantangan yang lebih kompleks, seperti mempertahankan kearifan lokalnya. Betapa pengaruh globalisasi sangat cepat, fundamental dengan mengacak-acak pola tatanan lama dan mendorong munculnya tatanan baru akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Orang Melayu harus menghadapi tantangan tersebut.

Orang Melayu jangan sampai tergerus jati dirinya, sebagai bagian dari jati diri bangsa Indonesia yang berkearifan lokal. Hal ini karena jati diri sebuah bangsa amat menentukan sejauhmana eksistensi sebuah bangsa mampu bertahan. Maka yang diperlukan di zaman globalisasi ini, adalah membangun bangsa sekaligus karakternya (*nation and character building*). Keduanya, yaitu membangun bangsa dan membangun karakter, ibarat satu koin dengan dua sisi yang menyatu, tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Membangun bangsa harus disertai dengan membangun karakternya, dan demikian pula sebaliknya. Dan, membangun karakter juga berarti merawat kearifan lokal sebagai bagian dari jati diri bangsa.

---

<sup>1</sup> Yasraf Amir Piliang, *Dunia yang dilipat: tamasya melampui batas-batas kebudayaan*, Ed. 3, cet. 1 (Bandung: Matahari, 2011).

<sup>2</sup> Ahmad Qodri A Azizy, *Melawan globalisasi: reinterpretasi ajaran Islam: persiapan SDM dan terciptanya masyarakat madani* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), vii.

Di sinilah posisi penting dari pendidikan karakter.<sup>3</sup> Inti dari pendidikan karakter, adalah membangun karakter seseorang sehingga mengetahui kebaikan (*knowing the good*), mencintai kebaikan (*desiring the good*), dan melakukan kebaikan (*doing the good*).<sup>4</sup> Dengan demikian, pendidikan karakter tidak seharusnya hanya mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, tetapi lebih dari itu, yaitu menanamkan kebiasaan (*habituation*) tentang yang baik, sehingga seseorang mengetahui, menyukai, dan terbiasa melakukannya. Karena, hakikatnya pendidikan, bertujuan membantu seseorang untuk menjadi cerdas dan pintar (*smart*) dan sekaligus menjadi orang yang baik (*good*).<sup>5</sup> Sementara itu pula, pendidikan karakter yang diberikan diharapkan dapat memperbaiki karakter buruk dari seseorang, seperti suka meremehkan, suka menerabas, mengabaikan tanggung jawab, hipokrit, beretos kerja rendah, suka menerabas, tidak punya rasa malu, dan semacamnya.<sup>6</sup>

Pendidikan karakter digadang-gadang untuk bisa membangun kembali karakter bangsa yang berkearifan lokal di tengah keadaannya yang sedang mengalami krisis. Bangsa Indonesia yang pernah dikenal sebagai bangsa yang berkearifan mulia, belakangan menunjukkan trend sebaliknya. Entah itu di televisi, radio, media cetak atau *online* perbuatan yang mencerminkan krisis karakter tersebut hampir tiap hari muncul diberita. Kecenderungan ini tentu amat membahayakan masa depan bangsa kita.

Orang Melayu Kalimantan Barat mempunyai kearifan lokal, yang bertumbuh dan berkembang serta digenggam kuat

<sup>3</sup> Ieke Sartika Iriany, "Pendidikan Karakter sebagai Upaya Revitalisasi Jati Diri Bangsa," *Jurnal Pendidikan Universitas Garut* 8, no. 1 (2014): 59; Sigit Mangun Wardoyo, "Pendidikan Karakter: Membangun Jatidiri Bangsa Menuju Generasi Emas 2045 Yang Religius," *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 1 (5 November 2015): 100, <https://doi.org/10.19105/jpi.v10i1.640>.

<sup>4</sup> Thomas Lickona, *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility* (New York: Bantam Books, 2009), <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=721446>.

<sup>5</sup> Samrin, "Pendidikan Karakter (Sebuah Pendekatan Nilai)," *Jurnal Al-Ta'dib* 9, no. 1 (Juni 2016): 121.

<sup>6</sup> Retno Listyarti, *Pendidikan Karakter dalam Metode Aktif, Inovatif dan Kreatif* (Jakarta: Erlangga, 2012), 8.

dalam keseharian sebagian mereka sejak dulu. Tentu saja kearifan lokal yang dianut oleh orang Melayu Kalimantan Barat sangat dekat dengan Islam, mengingat keterhubungan antara identitas Melayu dan Islam. Saat disebut Melayu, otomatis yang dimaksud adalah mereka “umat Islam” yang menjalankan keseharian sebagai orang Melayu.<sup>7</sup> Kearifan lokal ini bertumbuh dan berkembang di kalangan orang Melayu Kalimantan Barat, dan terkesan *hybrid*, di mana terjadi perpaduan kearifan lokal dengan nilai-nilai Islam.

Kearifan lokal orang Melayu Kalimantan Barat yang bersumber pada nilai-nilai Islam pada dasarnya ingin mengajak dan mengajarkan pada orang Melayu tentang bagaimana seharusnya membaca potensi alam dan menuliskan kembali tradisi yang diterima secara universal pada masyarakat. Nilai pada kearifan lokal yang mereka lakonkan menyelaraskan kehidupan mereka sebagai Melayu, dengan cara menghargai, memelihara, dan terlebih dalam usaha melestarikan fungsi alam atau lingkungan. Kearifan lokal ini mempunyai nilai luhur, mereka rawat dan tumbuh berkembang dalam keseharian mereka serta diajarkan secara turun-temurun, dan menjadi penanda identitas mereka sebagai Melayu dan umat Islam yang taat. Kearifan lokal ini, bahkan jauh sebelum adanya zaman globalisasi, telah menjadi basis orang Melayu Kalimantan Barat dalam membangun karakter.

Fokus artikel ini secara umum adalah kearifan lokal orang Melayu Kalimantan Barat, yang secara khusus ingin mengungkap cirinya yang *hybrid* Islam dan posisinya dalam membangun karakter di zaman ini (globalisasi). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang didekati dan dianalisis secara deskriptif.

## **B. Globalisasi, Pendidikan Karakter, dan Menggali Kearifan Lokal**

Telah diulas di muka, betapa pengaruh globalisasi sangat cepat, fundamental dengan mengacak-acak pola tatanan lama dan

---

<sup>7</sup> Hermansyah, *Islam dan Melayu di Borneo*.

mendorong munculnya tatanan baru akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Orang Melayuharus menghadapi tantangan tersebut. Hal ini karena globalisasi adalah fakta zaman ini, sebagai keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Sehingga yang harus dilakukan menurut Qodri Azizy, adalah respon, bukan lari menjauhi.<sup>8</sup>

Tentang dampak globalisasi pada krisis karakter, Din Syamsuddin ketika memberikan khutbah idul fitri 1433 H di Masjid al-Azhar (Jakarta, Minggu tanggal 19 Agustus 2012), telah menyampaikan inisebagai ancaman serius bagi eksistensi bangsa. Hal ini terjadi menurutnya, oleh karena globalisasi yang membuat bangsa kita terjebak pada permisivisme budaya dengan membiarkan dan mengabaikannya. Bahkan penyimpangan moral yang terjadi di masyarakat nyaris menjadi “moral baru” sebagaimana ada banyak kasus yang melibatkan banyak masyarakat terlibat dalam pelanggaran. Itulah yang terjadi pada perkembangan budaya bangsa saat ini yang terkesan makin hedonistik dan parahnya lagi mendapat dukungan masif dari masyarakatnya.<sup>9</sup>

Krisis karakter juga sedang terjadi di Kalimantan Barat. Kecenderungan ini bisa kita cermati dari trend berita yang berkembang. Seperti Surat Kabar Harian Rakyat Kalbar yang memberitakan tentang tiga episode kejahatan seksual, yang terjadi dalam tiga tempat yang berbeda dalam kurun waktu bulan Mei 2013 di Kalimantan Barat, yaitu siswi SMP yang digilir tiga rekannya di wilayah Kubu Raya; dua saudara sepupu diperkosa di stadion Kridasana di wilayah kota Singkawang dan ada murid SD yang dicabuli oleh pamannya sendiri yang terjadi di wilayah Mandor.

Penyalahgunaan narkoba dan NAPZA oleh anak-anak pelajar juga belum dapat diatasi secara baik. Belakangan juga marak siswa sekolah menghirup aroma lem (*ngelem*) dengan merk lem tertentu. Harian Rakyat Kalbar pernah menurunkan berita

<sup>8</sup> Azizy, *Melawan globalisasi*, vii.

<sup>9</sup> Deodatus S. Pradibto, “Masalah Bangsa Indonesia Berpangkal Pada Krisis Moral,” *Tribun News*, Agustus 2012, [m.tribunenews.com/nasional/2012/08/19/masalah-bangsa-indonesia-berpangkal-pada-krisis-moral](http://m.tribunenews.com/nasional/2012/08/19/masalah-bangsa-indonesia-berpangkal-pada-krisis-moral).

utama tentang anak yang kecanduan aroma lem. Dalam kurun waktu Januari hingga Maret 2013 sudah tercatat 35 orang anak yang terkatagorikan pencandu aroma lem (*ngelem*). 35 orang anak itu mereka yang tertangkap, sedangkan yang kabur pada saat dirazia dan belum terdeteksi tentu masih banyak lagi.

Padahal dampak buruk dari menghirup aroma lem tersebut sangat mengancam kesehatan. Menghirup aroma lem selain membuat mereka kecanduan juga bisa memutuskan ratusan urat syaraf, yang dapat mengakibatkan anak mengalami beberapa gangguan fisik seperti malas berpikir, nafsu makan berkurang dan fisik menjadi lemah. Bahkan, dampak terburuk seseorang bisa mengalami gagal jantung hingga mati lemas.<sup>10</sup>

Kasus-kasus di atas, menjadi alasan penting dari diberlakukannya pendidikan karakter. Karakter berdasarkan asal-usul katanya, berasal dari Bahasa Yunani yaitu *charassein*, yang berarti membuat tajam, membuat dalam, atau mengukir.<sup>11</sup> Bisa dimafhumi bagaimana sifat utama ukiran adalah melekat kuat di atas benda yang diukir. Karena itu karakter secara istilah sering diartikan sebagai ciri khas seseorang dan karakter pula tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya, dan terbentuk dalam lingkup sosial budaya tertentu.<sup>12</sup>

Karakter di sini juga identik dengan *akhlak*, sehingga karakter dapat diterjemahkan dengan nilai-nilai perilaku yang universal, yang mencakup seluruh aktifitas manusia baik dalam rangka berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama manusia, maupun dengan lingkungan, yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan dan perbuatan, berdasarkan

---

<sup>10</sup> “Mengerikan! Dampak Negatif Menghirup Lem, Gagal Jantung hingga Mati Lemas,” Nopember 2017, <https://lifestyle.okezone.com/read/2017/11/06/481/1809287/mengerikan-dampak-negatif-menghirup-lem-gagal-jantung-hingga-mati-lemas>.

<sup>11</sup> Lorens Bagus, *Kamus filsafat*, Ed. 1 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), 392.

<sup>12</sup> Syamsul Kurniawan, *Pendidikan Karakter: Konsepsi & Implementasinya Secara Terpadu di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 28.

norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat-istiadat.<sup>13</sup> Karakter juga bisa diartikan sebagai watak, tabiat, *akhlak* atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil penerapan berbagai kebajikan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan terdiri atas sejumlah nilai-, moral, dan norma seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya dan hormat kepada orang lain.<sup>14</sup>

Kaitannya dengan pendidikan karakter, pemerintah telah menjaminkannya, terutama dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 3 UU tersebut dijelaskan bahwa pendidikan hendaknya untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi seseorang agar menjad manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>15</sup>

Pendidikan karakter tidak boleh semata-mata mengandalkan sekolah. Akan lebih baik, ketika pendidikan karakter dapat diberikan pada tripusat pendidikan, yaitu dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat.<sup>16</sup> Khususnya masyarakat yang dalam tulisan ini diasumsikan sebagai tempat berlangsungnya pendidikan karakter, sepatutnya mendukung terselenggaranya model pendidikan karakter berbasis masyarakat, yang mana basisnya adalah kearifan lokal.

Pendidikan karakter yang berbasis kearifan lokal bukan saja urgen melainkan sudah sangat mendesak diberikan di masyarakat, agar krisis karakter yang sedang dialami bangsa ini tidak sampai

---

<sup>13</sup> Agus Wibowo, *Manajemen Pendidikan Karakter di Sekolah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 10.

<sup>14</sup> Syamsu Yusuf L.N. dan Nani M. Sugandhi, *Perkembangan Peserta Didik*, 7 ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018).

<sup>15</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2004).

<sup>16</sup> Syamsul Kurniawan, *Pendidikan Karakter: Konsep & Implementasinya Secara Terpadu di Lingkungan Keluarga, Seolah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat*.

menjadi penyakit yang kronis. Sekurang-kurangnya ada tujuh alasan yang mendasari pentingnya pendidikan karakter diberikan di masyarakat dengan berbasis kearifan lokal: pertama, karakter sebuah masyarakat adalah karakter bangsa yang berarti jati diri bangsa; kedua, karakter buruk seseorang di masyarakat seperti halnya sebuah virus, ia dapat menyebabkan seseorang dapat tertulari, yang berarti bisa berdampak buruk bagi keadaan masyarakat; ketiga, karakter buruk menggerogoti dan merusak sistem atau tatanan sosial di masyarakat; keempat, karakter senyatanya dapat dibentuk dan dididik melalui bimbingan atau pendidikan; kelima, karakter buruk sebuah bangsa tidak hanya berpeluang menghilangkan kepercayaan pada bangsa sendiri, tapi juga kepercayaan bangsa lain terhadap negara ini; keenam, pendidikan karakter yang sukses dilakukan dapat menjadi solusi bangsa ini untuk keluar dari krisis karakter yang berkepanjangan; dan ketujuh, masyarakat punya kearifan lokal yang potensial untuk membangun karakter.

Masyarakat sudah semestinya turut mendukung atau berperan dalam terselenggaranya pendidikan karakter dengan menggali kearifan lokalnya sendiri. Hal ini berarti setiap warga masyarakat yang menjadi bagian dari masyarakat harus bertanggung jawab melestarikan kearifan lokal mereka yang positif, yang mana dalam perkembangannya mendukung bagi pendidikan karakter. Hal ini mengarah pada konsep pendidikan karakter berbasis masyarakat (*community based education*) yang memanfaatkan kearifan lokal sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam pendidikan karakter. Sejalan dengan inibanyak ahli sependapat tentang bagaimana kearifan lokal memang dapat dimanfaatkan sebagai basis bagi pendidikan karakter di masyarakat, seperti misalnya keyakinan Hutcheon<sup>17</sup>.

Kearifan lokal yang menjadi basis dari pendidikan karakter berarti memosisikan kearifan lokal sebagai dasar yang membangun pandangan hidup, tujuan hidup, falsafah hidup, serta pegangan

---

<sup>17</sup> Pat Duffy Hutcheon, *Building character and culture* (Westport, Conn: Praeger, 1999).

hidup masyarakat sehingga berkarakter. Sebagai bangsa, Indonesia telah mempunyai potensi-potensi kearifan lokal itu. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia, yang biasanya lebih banyak tidak tertulis, senyatanya berpotensi menjadi basis pendidikan karakter, oleh karena berisikan pandangan hidup, tujuan hidup, falsafah hidup, serta pegangan hidup sebuah masyarakat yang biasanya terwariskan dari masa lampau secara turun-temurun. Termasuk kearifan lokal orang Melayu yang tinggal di Kalimantan Barat sangat potensial digali untuk tujuan ini.

Apalagi, seiring dengan perkembangan politik di Indonesia di era globalisasi yang memberikan angin segar bagi masing-masing pemerintah daerah untuk membangun daerahnya sesuai prinsip otonomi, dan juga ini berarti angin segar bagi masing-masing daerah untuk memunculkan kembali kearifan lokal mereka masing-masing yang dipercaya punya kekuatan dalam membangun karakter.

Sebagaimana dimafhumi, orang Melayu Kalimantan Barat mempunyai kearifan lokal, yang bertumbuh dan berkembang serta digenggam kuat dalam keseharian sebagian mereka sejak dulu. Tentu saja kearifan lokal yang dianut oleh orang Melayu Kalimantan Barat sangat dekat dengan Islam, mengingat keterhubungan antara identitas Melayu dan Islam. Saat disebut Melayu, otomatis yang dimaksud adalah mereka “umat Islam” yang menjalankan keseharian sebagai orang Melayu.<sup>18</sup> Maka kearifan lokal yang bertumbuh dan berkembang di kalangan orang Melayu Kalimantan Barat, umumnya mencerminkan nilai-nilai Islam.

### **C. Kalimantan Barat dan Orang Melayu**

Kalimantan Barat adalah nama dari sebuah Propinsi di Indonesia, yang terletak di Barat dari Pulau Kalimantan. Sebelah utara berbatasan dengan Sarawak, Malaysia Timur, sebelah selatannya berbatasan langsung dengan Laut Jawa, sebelah barat dengan Natuna, Selat Karimata, dan Semenanjung Malaysia,

---

<sup>18</sup> Hermansyah, *Islam dan Melayu di Borneo*.

sertasebelah timur berbatasan langsung dengan Propinsi Kalimantan Timur dan Propinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan luas wilayah, Kalimantan Barat menahbiskan diri sebagai propinsi terluas keempat setelah Papua. Luas wilayah Propinsi Kalimantan Barat adalah 146.807 km<sup>2</sup>Dengan demikian, 7,53% dari luas Indonesia.



**Gambar 1. Peta Kalimantan Barat<sup>19</sup>**

Secara geografis, Propinsi Kalimantan Barat mempunyai ratusan sungai besar dan kecil yang di antaranya dapat dilayari. Beberapa sungai besar sampai saat ini masih merupakan urat nadi dan jalur utama untuk angkutan daerah pedalaman, walaupun prasarana jalan darat telah dapat menjangkau sebagian besar kecamatan. Karenanya, Propinsi ini dijuluki sebagai Propinsi “Seribu Sungai”.

<sup>19</sup> “Kalimantan Barat,” Seasite NIU, 2018, <http://www.seasite.niu.edu/indonesian/indonesian-map/kalbar/kalbar.htm>.

Menurut kakawin Nagarakretagama, Kalimantan Barat menjadi taklukan Majapahit<sup>1</sup>, bahkan sejak zaman Singhasari yang menamakannya Bakulapura atau Tanjungpura. Wilayah kekuasaan Tanjungpura membentang dari Tanjung Dato sampai Tanjung Sambar. Pulau Kalimantan kuno terbagi menjadi 3 wilayah negara kerajaan induk: Borneo (Brunei), Sukadana (Tanjungpura) dan Banjarmasin. Tanjung Dato adalah perbatasan wilayah mandala Borneo (Brunei) dengan wilayah mandala Sukadana (Tanjungpura), sedangkan Tanjung Sambar batas wilayah mandala Sukadana/Tanjungpura dengan wilayah mandala Banjarmasin (daerah Kotawaringin).

Daerah aliran Sungai Jelai, di Kotawaringin di bawah kekuasaan Banjarmasin, sedangkan sungai Kendawangan di bawah kekuasaan Sukadana. Perbatasan di pedalaman, perhuluan daerah aliran sungai Pinoh (Lawai) termasuk dalam wilayah Kerajaan Kotawaringin (bawahan Banjarmasin). Menurut Hikayat Banjar (1663), Negeri Sambas, Sukadana dan negeri-negeri di Balitang Lawai atau Batang Lawai (nama kuno sungai Kapuas) pernah menjadi taklukan Kerajaan Banjar atau pernah mengirim upeti sejak zaman Hindu, bahkan Raja Panembahan Sambas telah menghantarkan upeti berupa dua biji intan yang berukuran besar yang bernama Si Giwang dan Si Misim.

Pada tahun 1604 pertama kalinya Belanda berdagang dengan Sukadana. Sejak 1 Oktober 1609, Kerajaan Panembahan Sambas menjadi daerah protektorat VOC Belanda. Walaupun belakangan negeri Sambas di bawah kekuasaan menantu Raja Panembahan Sambas yang merupakan seorang Pangeran dari Brunei, namun Negeri Sambas tetap tidak termasuk dalam mandala negara Brunei. Sesuai perjanjian 20 Oktober 1756 VOC Belanda berjanji akan membantu Sultan Banjar Tamjidullah I untuk menaklukan kembali daerah-daerah yang memisahkan diri di antaranya Sanggau, Sintang dan Lawai (Kabupaten Melawi), sedangkan daerah-daerah lainnya merupakan milik Kesultanan Banten, kecuali Sambas.

Menurut akta tanggal 26 Maret 1778 negeri Landak dan Sukadana (sebagian besar Kalbar) diserahkan kepada VOC Belanda oleh Sultan Banten. Inilah wilayah yang mula-mula menjadi milik VOC Belanda selain daerah protektorat Sambas. Pada tahun itu pula Syarif Abdurrahman Alkadrie yang dahulu telah dilantik di Banjarmasin sebagai Pangeran yaitu Pangeran Syarif Abdurrahman Nur Alam direstui oleh VOC Belanda sebagai Sultan Pontianak yang pertama dalam wilayah milik Belanda tersebut.

Pada tahun 1789 Sultan Pontianak dibantu Kongsu Lan Fang diperintahkan VOC Belanda untuk menduduki negeri Mempawah dan kemudian menaklukan Sanggau. Pada tanggal 4 Mei 1826 Sultan Adam dari Banjar menyerahkan Jelai, Sintang dan Lawai (Kabupaten Melawi) kepada pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Tahun 1846 daerah koloni Belanda di pulau Kalimantan memperoleh pemerintahan khusus sebagai Dependensi Borneo.

Pantai barat Borneo terdiri atas asisten residen Sambas dan asisten residen Pontianak. Divisi Sambas meliputi daerah dari Tanjung Dato sampai muara sungai Doeri. Sedangkan divisi Pontianak yang berada di bawah asisten residen Pontianak meliputi distrik Pontianak, Mempawah, Landak, Kubu, Simpang, Sukadana, Matan, Tayan, Meliau, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Sepapoe, Belitang, Silat, Salimbau, Piassa, Jongkong, Boenoet, Malor, Taman, Ketan, dan Poenan. Menurut *Staatsblad van Nederlandisch Indië* tahun 1849, 14 daerah di wilayah ini termasuk dalam *westerafdeeling* berdasarkan *Bésluit van den Minister van Staat, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië*, pada 27 Agustus 1849, No. 8. Pada 1855, negeri Sambas dimasukkan ke dalam wilayah Hindia Belanda menjadi Karesidenan Sambas.

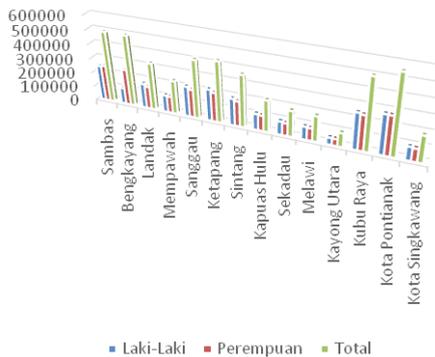
Menurut Hikayat Malaysia, Brunei, dan Singapore wilayah yang tidak bisa dikuasai dari kerajaan Hindu sampai kesultanan Islam di Kalimantan Barat adalah kebanyakan dari Kalimantan Barat seperti Negeri Sambas dan sekitarnya, dan menurut Negara Brunei Darussalam Hikayat Banjar adalah palsu dan bukan dibuat dari kesultanan Banjar sendiri melainkan dari tangan-tangan

yang ingin merusak nama Kalimantan Barat dan disebarluaskan keseluruh Indonesia sampai saat ini, karena menurut penelitian para ahli psikolog di dunia Negeri Sambas tidak pernah kalah dan takluk dengan Negara manapun.

Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal yang dimuat dalam STB 1938 No. 352, antara lain mengatur dan menetapkan bahwa ibukota wilayah administratif *Gouvernement* Borneo berkedudukan di Banjarmasin dibagi atas 2 Residentir, salah satu di antaranya adalah *Residentie Westerafdeeling Van Borneo* dengan ibukota Pontianak yang dipimpin oleh seorang Residen.

Pada tanggal 1 Januari 1957 Kalimantan Barat resmi menjadi provinsi yang berdiri sendiri di Pulau Kalimantan, berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 tanggal 7 Desember 1956. Undang-undang tersebut juga menjadi dasar pembentukan dua provinsi lainnya di pulau terbesar di Nusantara itu. Kedua provinsi itu adalah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Barat Menurut Kabupaten/Kota, berdasarkan Jenis Kelamin, pada tahun 2010, adalah 4.395.983 dengan perincian 2.246.903 jumlah laki-laki dan 2.149.080 jumlah perempuan. Perhatikan figure 1 untuk membaca jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, di Kalimantan Barat, pada masing-masing Kabupaten/Kota.

**Figur 1**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**



**Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat<sup>1</sup>**

Bila dilihat dari besaran agama yang paling banyak di anut, sebagian besar penduduk provinsi Kalimantan Barat memeluk agama Islam, yang berikutnya adalah Agama Katolik, Kristen, Budha, Hindu, Konghucu, dan Aliran Kepercayaan. Agama Islam menjadi mayoritas di hampir semua kabupaten dan kota kecuali di kabupaten Landak, Sanggau, Sintang dan Sekadau yang sebagian besar penduduk menganut agama Katolik, selain di beberapa kabupaten itu, Agama Katolik dengan populasi besar juga terdapat di Kabupaten Bengkayang dan Kapuas Hulu, sedangkan Agama Kristen dengan jumlah besar di Provinsi ini ada di Kabupaten Landak dan Sintang, Agama Budha dan Konghucu dengan populasi besar berada di Kota Pontianak dan Singkawang. Perhatikan figure 2 untuk membaca jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut oleh masyarakat di Kalimantan Barat, pada masing-masing Kabupaten/Kota.

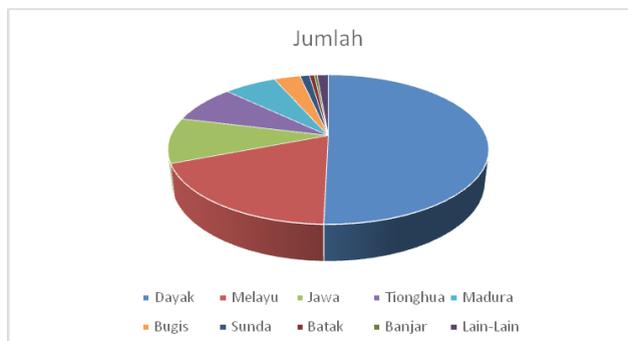


**Sumber: Data Statistik Kependudukan Propinsi Kalimantan Barat** <sup>20</sup>

Etnis paling dominan di Kalimantan Barat, yaitu Dayak dan kemudian diikuti oleh Melayu. Etnis Dayak merupakan etnis di daerah pedalaman, sedangkan etnis Melayu mayoritas di kawasan pesisir. Etnis terbesar ketiga yaitu etnis Jawa, dan berturut-turut Tionghua, Madura, Bugis, Sunda, Batak, dan Banjar, dan lain-lain. Perhatikan figur 2 untuk membaca jumlah penduduk Kalimantan Barat berdasarkan etnis:

<sup>20</sup> “Grafik Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama,” Data Statistik Kependudukan Propinsi Kalimantan Barat, 2018, <https://dukcapil.kalbarprov.go.id/statistik/agama>.

**Figur 3:**  
**Jumlah Penduduk Kalimantan Barat Berdasarkan Etnis**



**Sumber: Data Statistik Kependudukan Propinsi Kalimantan Barat** <sup>21</sup>

Orang Melayu Kalimantan Barat memeluk agama Islam. Kaitannya dengan ini, di Kalimantan Barat terdapat kaitan yang jelas antara identitas mereka sebagai orang Melayu dan agama yang mereka anut, yaitu Islam. Sebagaimana pendapat Hermansyah, yang menyimpulkan bahwa Melayu identik dengan Islam. Menurutnya, Islam merupakan penanda identitas kemelayuan seseorang. Dapat pula dikatakan, orang Melayu adalah identitas untuk menyebut masyarakat yang beragama Islam yang masih menjalankan tradisi atau adat-istiadat Melayu dalam keseharian mereka.<sup>22</sup> Dari aspek bahasa, orang Melayu Kalimantan Barat menggunakan bahasa Melayu dalam bertutur, sebagaimana seumumnya masyarakat Melayu.

#### **D. Kearifan Lokal Orang Melayu dan *Hybrid* Islam**

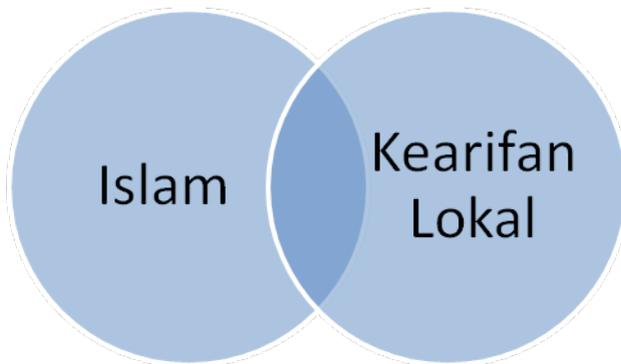
Bisa dimafhumi, Islam datang ke nusantara (Indonesia) tidak dapat dipisahkan dari nuansa di mana Islam itu lahir. Akan tetapi, Islam masuk ke Indonesia mampu beradaptasi dengan kebudayaan lokal. Proses persenyawaan keislaman dengan kenusantaraan, menjadikan Islam yang ada di nusantara ini, mudah diterima oleh

<sup>21</sup> "Grafik Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama," Data Statistik Kependudukan Propinsi Kalimantan Barat, 2018, <https://dukcapil.kalbarprov.go.id/statistik/agama>.

<sup>22</sup> Hermansyah, *Islam dan Melayu di Borneo*.

masyarakat. Tidak ada resistensi, yang ada adalah penyambutan. Sungguhpun ada modifikasi, itu tidak lebih dari injeksi nilai-nilai keislaman dalam tradisi yang telah ada.

Dalam perkembangannya, Islam dengan wataknya yang moderat dan apresiatif terhadap budaya lokal, serta memihak pada warga setempat dalam menghadapi tantangan, menyebabkan Islam diterima sebagai agama baru. Bukti nyata dari proses persenyawaan antara Islam dan budaya lokal, dapat ditemukan dalam bentuk keberagaman yang hibrida, seperti kecenderungan keberagaman islam yang umumnya dianut oleh orang Melayu Kalimantan Barat, melahirkan bentuk-bentuk kearifan lokal Melayu yang *hybrid*, di mana terjadi perpaduan antara Islam dan kearifan lokal. Perhatikan figur 4 berikut:



**Figur 4. Pola Hubungan antara Islam dan Kearifan Lokal yang *hybrid* di Kalangan Orang Melayu Kalimantan Barat**

Sulit untuk dipungkiri, bahwa Islam sebagai agama yang diterima di Nusantara (cikal bakal Indonesia) berkembang selaras dengan penerimaan atas nilai-nilai kearifan lokal tanpa meninggalkan jejak pertentangan sedikitpun. Ajaran Islam yang masuk ke Nusantara melalui ekspedisi para ulama yang bertugas sebagai misionaris (juru dakwah), paling tidak menunjukkan betapa ajaran Islam sangat akomodatif terhadap berbagai tradisi yang telah mengurat akar dalam masyarakat. Islam, dengan demikian, oleh para ulama Nusantara tidak diperkenalkan sebatas ajaran agama yang sarat ritual suci dan peribadatan, tetapi juga memiliki

cita seni yang tinggi, mengedepankan nilai moralitas dan akhlak yang dibawa dan dicontohkan para ulama penyebarannya.<sup>23</sup>

Anne K Rasmussen misalnya yang menyontohkan tentang beberapa peran walisongo yang berevolusi menanamkan nilai-nilai moral ajaran Islam kedalam perwujudan budaya setempat. Sunan Drajat misalnya, diakui sebagai pegiat seni gamelan yang terkenal, seraya memberikan nuansa filosofis keislaman di sela-sela irama musik gamelan yang ditabuhnya; Sunan Kudus dikenal sebagai penemu wayang golek yang saat ini menjadi pertunjukkan seni monumental di wilayah Jawa maupun Sunda; Sunan Kalijaga, konon dikenal sebagai penanggungjawab sebuah ritual gamelan fenomenal di Jawa, yaitu *Sekaten*. Pengakuan atas keberadaan wali songo sebagai kontributor dan penyokong akulturasi budaya melalui metode berakhlak dan berkesenian yang disesuaikan dengan tradisi Islam, saya kira, telah banyak ditulis dan diungkap para ilmuwan dan sejarawan yang *concern* terhadap perkembangan Islam Nusantara.<sup>24</sup> Kecenderungan ini juga mengemuka dalam proses pertemuan antara kearifan lokal dan Islam, sehingga melahirkan bentuk-bentuk kearifan lokal yang *hybrid* Islam. Bahkan, model keberislaman yang *hybrid* ini, sebagai kecenderungan yang jamak ditemui dalam kehidupan umat Islam di Indonesia, dan di Kalimantan Barat salah satunya.<sup>25</sup>

## E. Orang Melayu Kalimantan Barat dan kearifan Lokal Yang *Hybrid* Islam

Kalimantan Barat adalah miniatur Indonesia. Disebut demikian, karena hampir seluruh etnis di Indonesia ada di

<sup>23</sup> Syahirul Alim, "Peran Ulama Nusantara dalam Akulturasi Islam," Oktober 2017, <https://indonesiana.tempo.co/read/117485/2017/10/04/Peran-Ulama-Nusantara-dalam-Akulturasi-Islam>.

<sup>24</sup> Anne K. Rasmussen, *Women, the recited Qur'an, and Islamic music in Indonesia* (Berkeley: University of California Press, 2010).

<sup>25</sup> Faizal Amin, "Kitab Berladang: A Portrait of Hybrid Islam in West Kalimantan," *Studia Islamika* 20, no. 1 (30 April 2013), <https://doi.org/10.15408/sdi.v20i1.349>; Darwin Darmawan, "Jangan Bakukan Aku: Identitas Hybrid Islam di Indonesia," *Kawistara* 2, no. 2 (Agustus 2012): 105–224, <https://doi.org/10.22146/kawistara.3969>.

Kalimantan Barat. Berbagai etnis bangsa yang datang dan mengail rezeki di Kalimantan Barat, sebabnya bukan hanya karena luasan daerah dan potensi besar sumber daya alamnya untuk dimanfaatkan, namun juga karena sikap etnis lokal Kalimantan Barat, di antaranya Melayu yang berkooperatif dan terbuka dengan etnis pendatang. Terpenting, masyarakat pendatang memegang falsafah, “*di mana bumi di pijak di situ langit dijunjung*”. Atau dalam semboyan orang Melayu, “*awak datang kamek sambol*”.

Falsafah “*di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung*” atau “*awak datang kamek sambol*” sesungguhnya mengisyaratkan tentang pentingnya etnis pendatang menghargai atau menghormati kearifan lokal yang dipegang kuat oleh etnis lokal di Kalimantan Barat. Meskipun begitu, ini tidak berarti penduduk pendatang tertutup peluang untuk mempromosi atau menyebarluaskan kearifan lokal yang mereka punyai, sejauh tidak membenturkannya dengan kearifan lokal yang diyakini dan digenggam kuat oleh etnis lokal di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, kesemuanya itu dapat berkembang, dan bahkan dalam beberapa kasus justru melebur dan atau berakulturasi dengan kearifan etnis lokal, dan melahirkan kearifan lokal yang *hybrid*.

Kearifan lokal orang Melayu di Kalimantan Barat hakikatnya mencakup tata nilai atau seperangkat aturan berperilaku orang Melayu Kalimantan Barat dalam merepresentasikan ketaatannya pada Tuhannya, berinteraksi dengan sesamanya, dan bersikap harmonispada lingkungannya. Melalui kearifan lokal ini, orang Melayu diharapkan menjadi arif dalam kesehariannya. Seperti kita mafhumi, kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan, hukum, serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun seseorang dan kelompok dalam komunitasnya.

Kearifan lokal (*local wisdom*) bisa dimaknai dengan kebijaksanaan setempat.<sup>26</sup> Atau, kearifan lokal merupakan gagasan-

---

<sup>26</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2006), 363, 649.

gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat (lokal) yang mengandung kebijaksanaan, kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal memang merujuk pada lokalitas dan komunitas tertentu, yang mana masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempat hidupnya memandang dan berlaku secara arif.<sup>27</sup>

Jadi wajar jika antara kearifan lokal antara satu komunitas masyarakat dengan komunitas masyarakat yang lain dapat berbeda. Perbedaan bisa disebabkan karena perbedaan kebutuhan dan tantangan alam yang berbeda. Pengalaman masyarakat lokal, Melayu misalnya, dalam mencukupi kebutuhan hidupnya memunculkan sistem pengetahuan baik yang berhubungan dengan lingkungan maupun sosialnya, dan bisa berbeda dengan komunitas etnis masyarakat lainnya.

Sementara Sonny Keraf menegaskan bahwa kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat istiadat atau kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku seseorang dalam kehidupannya di dalam komunitas atau lingkungannya. Semua bentuk kearifan lokal kemudian dihayati, dipraktikkan, diajarkan, dan diwariskan dari sebuah generasi ke generasi berikutnya yang membentuk pola perilaku manusia dengan sesamanya, alam, maupun dengan sesuatu yang gaib.<sup>28</sup>

Kearifan lokal orang Melayu Kalimantan Barat yang bersumber pada nilai-nilai pada dasarnya mengajak dan mengajarkan tentang bagaimana seharusnya membaca potensi alam dan menuliskan kembali tradisi yang diterima secara universal oleh masyarakat. Nilai pada kearifan lokal yang mereka lakonkan menyelaraskan kehidupan mereka sebagai Melayu, dengan cara menghargai, memelihara, dan terlebih dalam usaha melestarikan fungsi alam atau lingkungan. Kearifan lokal ini mempunyai nilai luhur, mereka rawat dan tumbuh berkembang dalam keseharian

<sup>27</sup> Andi M. Akhmar dan Syarifuddin, *Mengungkap Kearifan Lingkungan Sulawesi Selatan* (Makassar: PPLH Regional Sulawesi, Maluku dan Papua, Kementerian Lingkungan Hidup RI dan Masagena Press Makassar, 2007).

<sup>28</sup> Sonny Keraf, *Etika Lingkungan* (Jakarta: Kompas, 2006).

mereka serta diajarkan secara turun-temurun, dan menjadi penanda identitas mereka sebagai Melayu dan umat Islam yang taat. Sebagaimana pendapat Hermansyah, yang menyimpulkan bahwa Melayu identik dengan Islam.

Kearifan lokal orang Melayu umumnya tidak tertulis, dan biasanya merupakan sebuah konsensus atau kesepakatan bersama yang telah disepakati untuk dijalankan dari generasi Melayu sebelumnya ke generasi Melayu berikutnya. Oleh sebab itu, biasanya seorang Melayu yang melanggar budaya dan kearifan lokal di lingkungannya dihukumi secara sosial, disebut tak beradab, dan tidak menghormati leluhur atau adat kebiasaan sebagai orang Melayu.

Ditinjau dari sisi etnis Melayu dan kearifan lokal yang ada di Kalimantan Barat, maka kearifan lokal Melayu menunjukkan fakta kemajemukan Kalimantan Barat. Masing-masing daerah di Kalimantan Barat, kearifan lokal orang Melayu bisa sama namun dalam beberapa bentuk juga bisa berbeda, seperti antara orang Melayu Pontianak, orang Melayu Sambas, orang Melayu Sanggau, orang Melayu Ketapang, dan seterusnya. Namun bisa dimengerti bagaimana kearifan lokal pada masing-masing Melayu di daerah-daerah ini dulunya adalah sumber nilai dan inspirasi mereka, orang Melayu Kalimantan Barat dalam menjalani hidup.

Kearifan lokal merupakan istilah yang biasanya digunakan untuk membedakan sebuah budaya dari budaya nasional (Indonesia) dengan budaya luar. Kearifan lokal pada konteks ini adalah kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat yang menempati lokalitas atau daerah tertentu yang berbeda dari kearifan lokal yang (mungkin) dimiliki oleh masyarakat yang berada di tempat yang lain. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah, mendeskripsikannya sebagai suatu sistem nilai yang dianut oleh komunitas atau kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-

harapan warga masyarakatnya dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap tatacara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat.<sup>29</sup>

Di Indonesia istilah kearifan lokal juga sering disepadankan dengan budaya etnik/ subetnik. Setiap bangsa, etnik, dan sub etnik memiliki kearifan lokal yang mencakup tujuh unsur, yaitu: bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi, dan kesenian. Secara umum, kearifan lokal dapatlah dianggap sebagai pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dengan pengertian-pengertian tersebut, kearifan lokal orang Melayu Kalimantan Barat tentu bukan sekedar nilai tradisi atau ciri lokalitas orang Melayu yang berdomisili di Kalimantan Barat semata melainkan nilai tradisi orang Melayu Kalimantan Barat yang mempunyai daya-guna untuk untuk mewujudkan harapan atau nilai-nilai kemapanan yang juga secara universal yang didamba-damba oleh manusia.

Pada aras ini, kearifan lokal orang Melayu Kalimantan Barat adalah pengetahuan yang dikembangkan oleh para leluhur orang Melayu dalam menyiasati lingkungan hidup sekitar mereka, menjadikan pengetahuan itu sebagai bagian dari kearifan lokal dan memperkenalkan serta meneruskan itu dari generasi mereka ke generasi berikutnya. Beberapa bentuk pengetahuan tradisional itu muncul lewat cerita-cerita, legenda-legenda, nyanyian-nyanyian, ritual-ritual, pantang larang dan juga aturan atau hukum adat.

Tidak semua varian kearifan lokal yang bertumbuh dan berkembang di Kalimantan Barat akan dibahas pada artikel ini. Pada bagian ini peneliti membatasi pembahasan sebatas varian

---

<sup>29</sup> “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah” (Kementerian Dalam Negeri, Agustus 2007).

kearifan lokal seperti hukum adat Melayu, *pantang larang*; dan upacara adat.

## 1. Hukum Adat Melayu

Hukum adat Melayu lahir, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat etnis Melayu yang seringnya tidak tertulis. Dapat dimengerti, bahwa hukum adat Melayu ini memuat seperangkat aturan atau norma berperilaku yang punya konsekuensi apabila dilanggar. Seperti halnya agama atau hukum positif, hukum adat Melayu juga berfungsi membingkai dan mengatur perilaku seseorang dan kelompok agar berperilaku sebagaimana mestinya dan mencapai harmoni. Harmoni yang dimaksud adalah harmoni dengan sesama manusia dan harmoni dengan alam. Termasuk sebagai representasi ketaatan pada Tuhan.

Disadari atau tidak, sebagai bagian dari masyarakat, sebagian orang telah melaksanakan dengan patuh ketentuan-ketentuan dalam hukum adat. Hukum adadengan demikian telah menjadi basis pendidikan karakter masyarakat, terutama untuk membingkai dan mengatur perilaku seseorang dan kelompok agar berperilaku dengan baik. Bahkan seringkali hukum adat menjadi alternatif penyelesaian konflik di sejumlah daerah, seperti kasus konflik di Aceh, Poso, Ambon, dan Sampit, serta konflik-konflik yang pernah terjadi di Kalimantan Barat (seperti konflik etnis di Sanggau Ledo dan Sambas)

Hukum adat sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat, bahkan dapat menjadi pilar kerukunan umat beragama. M. Maftuh Basyuni, pada sebuah seminar nasional "*Kerukunan Umat Beragama Sebagai Pilar Kerukunan Nasional*", di Jakarta pada hari Rabu, 31 Desember 2009, mengatakan: "...sesungguhnya masyarakat Indonesia di seluruh *pelosok tanah air telah memiliki sejumlah kearifan lokal yang telah mampu menjadi penopang kerukunan umat beragama di daerah masing-masing...*" Pada aras ini, kerukunan umat beragama adalah proses dinamis yang perlu terus diupayakan oleh semua lapisan masyarakat. Kerukunan umat beragama yang menjadi pilar

bagi kerukunan nasional. Konflik sosial, ekonomi, politik sangat rentan “ditunggangi” dan bergeser menjadi konflik antar umat beragama. Dalam berbagai kasus konflik di daerah di mana berlaku hukum adat, seringkali potensial untuk memediasi sehingga secara fungsional dapat menjadi perekat bagi terwujudnya kerukunan umat beragama. Hukum adat sebagai bentuk kearifan lokal di tengah masyarakat bisa diberdayakan sebagai solusi alternatif untuk mengatasi berbagai konflik dan kekerasan di tengah masyarakat, khususnya dalam mengatasi konflik etnis dan agama.

Dalam konteks pemeliharaan kerukunan umat beragama dalam konteks Kalimantan Barat, misalnya, hukum adat itu sendiri memiliki 3 fungsi yakni: pertama, fungsi dialogis yakni fungsi saling membuka diri untuk saling mengenal; kedua, fungsi integratif yakni fungsi menyatukan keragaman dan mempererat kohesi solidaritas; dan ketiga, fungsi transformatif yaitu fungsi mengubah ketertinggalan dan konflik ke kemajuan, kebersamaan dan perdamaian. Karena itu fungsi hukum adat sebagai basis pendidikan karakter, termasuk pada aras ini hukum adat Melayu, tidak boleh disepelekan, apalagi ia merupakan produk hukum yang lahir dari kearifan lokal dan turun-temurun ditaati dan dipatuhi oleh orang Melayu.

Hukum adat Melayu sebagai hukum yang tidak tertulis (*unwritten law*) menjadi basis pendidikan karakter karena mengajarkan masyarakat untuk hidup teratur bermasyarakat. Positifnya, orang Melayu jadi tertib, aman, dan hidup dalam harmoni. Di Indonesia hukum adat sesungguhnya telah lama dikenal jauh sebelum produk hukum tertulis lahir di era penjajahan Belanda, seiring dengan semangat reformasi kembali diperbincangkan perannya. Belakangan, hukum adat dirasakan penting untuk dioptimalkan. Secara yuridis, keberadaan hukum adat diakui. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 B (2) dijelaskan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.<sup>30</sup>

Mengingat hukum adat adalah produk dari kearifan lokal masyarakat, maka kemungkinan adanya perbedaan produk hukum menjadi sebuah hal yang niscaya. Hal ini karena tidak ada masyarakat lokal yang hidup secara homogen dalam satu kawasan atau wilayah adat sendiri tanpa “berbagi ruang” dengan masyarakat lokal lainnya, di mana masing-masing masyarakat lokal pastilah mempunyai produk hukum yang lahir dari kearifan lokalnya. Istilah berbagi ruang dipinjam dari istilah M. Amin Abdullah, guru besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagaimana pernah ia sampaikan dalam *Studium General* “Penguatan Peran Pendidikan dalam Menginternalisasikan Nilai-nilai Anti Kekerasan dan Inklusivisme di Masyarakat”, Sabtu, 13 April 2013 di IAIN Pontianak.

Dalam kasus Kalimantan Barat – meminjam pendapat James T. Collins, yang menyatakan orang Dayak dan orang Melayu sebagai masyarakat asli di Kalimantan Barat – masing-masing hukum adat dari masing-masing masyarakat lokal dapat berjalan “berdampingan”.<sup>31</sup> Meskipun dalam beberapa hal ada yang identik, namun dalam hal hukum adat – baik orang Dayak dan orang Melayu – ada perbedaan-perbedaan.

Persamaannya, kedua etnis lokal Kalimantan Barat ini sama-sama mempunyai kearifan tentang bagaimana menjaga kehormatan diri dan keluarga, menjaga persaudaraan, menjaga harmoni dengan alam atau lingkungan, dan aturan-aturan yang representasi ketaatan pada Tuhan. Semuanya dimaksudkan agar tercipta keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan alam. Hal ini juga mendasari lahirnya hukum adat yang berkembang di tengah-tengah ke dua masyarakat etnis lokal ini. Sementara perbedaannya, orang Melayu, tidak memiliki hukum

---

<sup>30</sup> *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2016).

<sup>31</sup> Yusriadi dan Hermansyah, “Alam Melayu dan Masyarakat Embau,” dalam *Orang Embau: Potret Masyarakat Pedalaman Kalimantan* (Pontianak: STAIN Pontianak Press, Yayasan Adikarya IKAPI, dan The Ford Foundation, 2003).

adat tersendiri sebagaimana orang Dayak, apalagi tertulis seperti dalam bentuk *qanun* (hukum adat). Kalaupun ada, produk hukum tersebut adalah peninggalan para sultan yang pernah berkuasa di Kalimantan Barat, dan belum diakui secara jamak atau keseluruhan orang Melayu di Kalimantan Barat.

Orang Melayu Kalimantan Barat yang identik dengan kepemilikan agama Islam meletakkan hukumnya pada hukum agama yang disebut syariat. Masyarakat Melayu mengenal semboyan: “adat bersendikan syara’, dan syara’ bersendikan *Kitabullah* dan Sunnah Rasul”. Maknanya, Bagi masyarakat Melayu, hukum adat melekat dan bersandar pada syariat Islam yang berdasarkan pada al-Qur’an dan as-Sunnah.

Dalam hal ini, sebagian hukum adat Melayu senyatanya telah terakomodir sebagian dalam hukum negara, semisal tentang hukum perkawinan dan hukum waris yang diatur melalui perundang-undangan. Sebagian lain diambil dari hukum-hukum yang disadur dari ajaran agama Islam. Sementara pada masyarakat lokal Dayak, mereka mengenal hukum adat tersendiri yang dirumuskan dan disepakati oleh masyarakat adatnya, dijalankan dan ditaati bersama dengan pengawasan pemuka adat atau kepala adat. Hukum adat masyarakat Dayak tentu saja positif sebagai pegangan hukum adat dan masyarakat lokal Dayak dalam komunitas mereka.

Kita tentu menyetujui bahwa hukum adat yang membawa semangat kearifan lokal mempunyai peran yang tidak sedikit dalam pergaulan hidup atau bermasyarakat. Melalui hukum adat Melayu, orang Melayu dididik untuk berdisiplin, taat peraturan dan tertib berperilaku. Hukum adat Melayu juga dapat menyatukan masyarakat, karena melaluinya masyarakat menjadi saling membantu dalam menegakkan aturan. Hukum adat Melayu juga menjamin kepastian dan keadilan di masyarakat tempat di mana hukum tersebut dipakai atau diterapkan.

Tentu tak dapat dibayangkan apa yang terjadi masyarakat tanpa pedoman atau aturan. Seperti dimafhumi, dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan karakter warga masyarakat dapat

memancing terjadinya konflik dan ketegangan sosial, yang tentu dapat merusak keamanan dan kenyamanan bermasyarakat. Untuk itulah hukum diperlukan, terutama agar menjadi standar atau pedoman berperilaku. Hukum, termasuk hukum adat, mengatur atau menentukan hak dan kewajiban demi melindungi kepentingan individu dan sosial. Dalam berbagai kasus konflik di berbagai daerah, hukum adat seringkali menjadi “penyelesai” masalah. Di Kalimantan Barat, hukum adat yang dianut sebagian kelompok masyarakat lokal, menertibkan, mengatur pergaulan, menyelesaikan pertikaian, dan memberikan kepastian hukum. Dalam konteks ini, hukum adat yang diterapkan dapat menjadi basis pendidikan karakter masyarakat, yaitu orang Melayu, terutama dalam menanamkan kedisiplinan dan ketaatan mematuhi peraturan, serta menjamin hak-hak mereka untuk merasakan keadilan.

## 2. *Pantang larang*

*Pantang larang* juga dapat menjadi basis pendidikan karakter bagi masyarakat, termasuk Melayu. Kaitan dengan ini, telah peneliti ungkap pada dua penelitian tentang *pantang larang* orang pada Melayu yang peneliti lakukan di Sambas.<sup>32</sup> *Pantang larang* juga dapat menjadi basis pendidikan karakter, disebut demikian, karena berisikan nilai-nilai atau pesan-pesan moral positif dalam membangun karakter.

*Pantang larang* sengaja dibuat oleh leluhur untuk menyiasati lingkungan tempat mereka tinggal, dan selanjutnya menjadikan pengetahuan itu sebagai bagian dari budaya atau kearifan lokal, dan memperkenalkan serta meneruskannya secara turun-temurun ke generasi berikutnya. Maka pada *pantang larang*, tersirat pesan yang mendalam, terutama tentang pentingnya membangun hubungan baik dengan sesama dan alam, serta mengembangkan

---

<sup>32</sup> Syamsul Kurniawan, “Pantang Larang in The Sepinggan Village Muslim Community from The Perspective of Character Education,” *Ta’idib* 21, no. 2 (31 Desember 2016): 113, <https://doi.org/10.19109/td.v21i2.771>; Syamsul Kurniawan, “Pantang Larang And The Environmental Wisdom Of Sambasness Malay In The Sepinggan Village,” *KALAM* 12, no. 1 (3 Juli 2018): 87, <https://doi.org/10.24042/klm.v12i1.1882>.

etika atau sopan santun dalam keseharian. *Pantang larang* pada masa lampau merupakan strategi dalam mengajarkan anak-anak tentang penghargaan terhadap makhluk ghaib, yang walupun tak terlihat, namun mereka ada, dan berdampingan dengan manusia. Belum lagi jika kita tinjau dari segi kesehatan dan dihubungkan juga dengan ajaran agama.

Sebagai contoh *pantang larang* yang berhubungan dengan pelajaran etika yang berlaku di kalangan orang Melayu, di mana seorang anak gadis *pantang larang* duduk di depan pintu rumah karena membuatnya sulit mendapatkan jodoh. Hikmah atau pesan yang hendak dihantarkan oleh orang tua melalui *pantang larang* ini bahwa seorang anak gadis tidaklah pantas duduk di depan pintu. Selain menghalangi jalan masuk dan sangat mengganggu, juga melanggar etika sopan-santun. Jadi *pantang larang* ini berkaitan dengan pesan menjaga etika (tepatnya akhlak) dan estetika, yaitu menempatkan kepantasan seorang gadis di mana ia harus duduk. Hal ini tentu saja juga berkenaan dengan hubungan sosial (tata kesusilaan) yang berlaku di masyarakat dan sesuatu yang amat ditekankan dalam ajaran Islam.

Berikutnya *pantang larang* yang berhubungan dengan lingkungan sekitar, seperti seseorang dilarang mencuci kuali atau membuang abu secara langsung ke sungai, atau *pantang larang* saat berada di hutan di mana seseorang kencing di liang-liang kayu atau lubang tanah, karena bisa membuat hantu hutan marah. Tersirat, *pantang larang* ini mengajarkan tentang pentingnya bersikap arif pada lingkungan, di antaranya dengan tidak mencemarinya. Sikap kepedulian terhadap lingkungan jelas positif untuk ditumbuhkembangkan pada kepribadian atau karakter seseorang. Seperti dimafhumi, berbagai bencana atau musibah seperti kabut asap, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya sebagiannya disebabkan karena perbuatan destruktif manusia pada alam, akibat kurang arifnya pada lingkungan.

*Pantang larang* juga dapat kita lihat dari segi upaya menjaga kesehatan dan kebersihan. Misalnya, tidur jangan sambil tengkurap, memotong kuku pada waktu malam hari, dan lain-lain. Kesemua

itu adalah wujud dari kebijaksanaan orang tua dalam mengajarkan anak-anaknya untuk menjaga kesehatan dan kebersihan.

Ada pula pantang yang berbunyi : “*Tidak boleh turun di waktu hujan-panas, nanti mendapatkan demam karena hantu hujan panas*”. Tersirat pada *pantang larang* ini, hujan panas, adalah cuaca yang kurang baik untuk kesehatan, karena keadaan suhu ataupun cuaca terang atau terasa panas, tetapi hujan turun. Sehingga uap panas tanah naik dan mengeluarkan bau yang tidak nyaman. Keadaan cuaca seperti ini diyakini secara turun temurun tidak sehat dan bahkan berbahaya bagi anak, sehingga dapat mengakibatkan anak demam-panas. Terlepas dari itu semua. Ada pesan moral yang ingin disampaikan dalam pantang-larang tersebut, yaitu jangan biarkan anak bermain dalam cuaca yang tidak sehat dan keadaan yang tidak aman dan nyaman.

*Pantang larang* makan jangan bersisa, karena dapat menyebabkan orang-orang sekitar yang disayangi meninggal dunia. Meski kesannya sedikit mengada-ngada, namun sesungguhnya pantang larang ini sangat dekat dengan ajaran agama, terutama Islam yang melarang perbuatan perbuatan mubazir. Selain itu, *pantang larang* tersebut juga mengajarkan pada anak-anak untuk terbiasa menghargai makanan, berapapun jumlahnya. Perbuatan tersebut, selayaknya memang harus dibiasakan sejak kecil, karena itu akan membentuk perilakunya sampai ia dewasa.

Seorang anak *pantang larang* bermain di luar rumah pada waktu menjelang shalat maghrib, jika tidak disembunyikan hantu. Secara tersirat, *pantang larang* ini ingin menyampaikan pesan bahwa sebelum waktu maghrib anak-anak sudah harus berada di rumah, tidak lagi bermain-main di luar rumah atau halaman, dan sekaligus menjadi dasar menganjurkan mereka untuk ikut shalat maghrib. Pantang larang ini memiliki landasannya, “Jangan lepas hewan ternak kalian dan anak-anak kalian apabila matahari terbenam hingga berlalunya awal waktu Isya. Karena setan bertebaran jika matahari terbenam hingga berlalunya awal waktu Isya.” (HR Muslim)

### 3. Upacara adat

Upacara adat, adalah varian kearifan lokal yang juga berkembang di kalangan orang Melayu Kalimantan Barat, dan dapat menjadi basis dalam pendidikan karakter. Upacara adat yang berkembang pada orang Melayu Kalimantan Barat, dalam berbagai variannya, mengandung pesan-pesan moral atau nilai-nilai pendidikan yang ingin disampaikan, sekalipun tak mudah untuk dipahami oleh pelakunya. Menurut Moh. Haitami Salim, penanaman nilai-nilai pendidikan dapat melalui proses komunikasi sosial dan adat budaya yang di antaranya berupa adat-istiadat.<sup>33</sup>

Upacara adat yang dilakukan orang Melayu di Kalimantan Barat, berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara, merupakan cara seorang atau sekelompok orang Melayu dalam merespons atau berhubungan dengan alam/makhluk sekitarnya dan Tuhan, sekaligus sebagai ungkapan pengharapan mereka untuk hidup tenang, selamat, bahagia dan terhindar dari segala bencana dan malapetaka. Karenanya setiap upacara adat Melayu mestilah memiliki pesan-pesan moral dan pesan-pesan spiritual yang sesungguhnya tidak lain adalah nilai-nilai karakter.

Contohnya upacara adat masyarakat Melayu Kalimantan Barat seperti *gunting rambut*, *kbitanan*, *meminang*, *pernikahan*, dan melaksanakan kewajiban *fardlu kifayah* atas mayat, dan memasukkan unsur-unsur Islam dalam amalan upacara adat mereka. Jelas kearifan lokal ini menjadi basis bagi pendidikan karakter di masyarakat. Nilai-nilai ini dalam amalan upacara adat juga ditunjukkan dalam adab atau sikap ketika berdo'a yang penuh *kebushu'* dan *thawadlu'*. Karena do'a hampir ada pada seluruh amalan upacara adat masyarakat lokal Melayu tersebut.

Nilai-nilai karakter lain yang tersirat adalah menjaga hubungan dengan keluarga, para tetangga dan sahabat dengan mengundang mereka setiap kali melaksanakan amalan upacara adat, berbagi kasih atau rezeki dalam bentuk makanan dan minuman dalam jamuan pada tiap-tiap amalan upacara adat.

---

<sup>33</sup> Moh. Haitami Salim, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Upacara Adat Melayu Pontianak* (Pontianak: STAIN Pontianak Press, 2013), 310.

Menyayangi yang lebih muda dan menghormati orang tua atau yang dituakan, adalah nilai-nilai akhlaq yang diteladankan dalam upacara adat. Menyayangi yang lebih muda (terutama anak-anak) dan memberikan kegembiraan kepada mereka dapat dilihat pada upacara adat seperti *naik ayon*, *gunting rambut*, atau *khitanan*.

Begitu pula penghormatan pada yang lebih tua dan orang yang dituakan selalu ditunjukkan dengan menempatkan mereka dalam majelis upacara adat di tempat yang semestinya dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan sebagian daripada rangkaian upacara adat yang dilaksanakan seperti menggunting rambut dalam amalan upacara adat *gunting rambut*, melakukan tepung tawar pada amalan upacara adat *tepung tawar* dan melakukan cucur mawar pada amalan upacara adat *cucur mawar* dalam rangkaian upacara pernikahan/ perkawinan dan lain sebagainya.

**Gambar 2. Upacara adat pernikahan masyarakat Melayu di Kota Pontianak, Kalimantan Barat (foto dokumentasi penulis, 2015).**



**Gambar 3. Upacara adat selamatan dan gunting rambut masyarakat Melayu di Kota Pontianak, Kalimantan Barat (dokumentasi penulis, 2015).**



Dalam amalan upacara adat Melayu Kalimantan Barat terdapat juga nilai-nilai karakter yang berkenaan dengan cara bagaimana berhubungan dengan alam sekitar atau memelihara lingkungan seperti tidak boleh membuang sesuatu di sembarang tempat, semisal membuang air dalam amalan upacara adat *buang-buang* dan *mengantar tembungik*. Penggunaan tetumbuhan tertentu dan hewan dalam amalan upacara adat *naik ayon* dengan menggunakan daun nyiur (kelapa) sebagai hiasan, kucing yang dimasukkan ke dalam ayunan, dan anak batu giling serta pisau, semua itu menunjukkan adanya usaha penanaman nilai-nilai pengenalan alam lingkungan sekaligus pelestarian alam dan menyayangi hewan.

Kearifan lokal orang Melayu Kalimantan Barat yang *hybrid* Islam, lahir, bertumbuh dan berkembang dalam keseharian orang Melayu di Kalimantan Barat. Karena ia tumbuh dan berkembang dalam konteks masyarakat lokal Kalimantan Barat, maka kearifan lokal ini dapat dijadikan sebagai basis pendidikan karakter dalam coraknya yang *hybrid* Islam, khususnya untuk kalangan mereka, yaitu pada komunitas orang Melayu di Kalimantan Barat yang umumnya memeluk ajaran agama Islam.

Signifikansinya, terutama untuk: pertama, pengembangan kebiasaan dan perilaku seseorang yang terpuji sejalan dengan nilai-nilai universal budaya dan karakter bangsa serta ajaran Islam; kedua, penanaman jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab seseorang sejalan dengan nilai-nilai universal budaya dan karakter bangsa serta ajaran Islam; ketiga, pengembangan kemampuan seseorang sebagai seseorang yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan sejalan dengan nilai-nilai universal budaya dan karakter bangsa serta ajaran Islam; dan kelima, pengembangan lingkungan masyarakat sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreatifitas dan persaudaraan sejalan dengan nilai-nilai universal budaya dan karakter bangsa serta ajaran Islam.

Kearifan lokal orang Melayu yang *hybrid* Islam ini dapat menjadi basis pendidikan karakter karena mencakup sistem pengetahuan masyarakat lokal/pribumi (*indigenous knowledge*

*systems*), yaitu Melayu. Sifatnyadapat dikatakan bersifat empirik dan pragmatis. Bersifat empirik karena merupakan “hasil olahan” masyarakat secara lokal berangkat dari fakta-fakta yang terjadi di sekeliling kehidupan mereka. Bertujuan pragmatis karena seluruh konsep yang terbangun sebagai hasil olah pikir dalam sistem pengetahuan itu bertujuan untuk pemecahan masalah sehari-hari (*daily problem solving*).

Untuk menggali kearifan lokal orang Melayu Kalimantan Barat yang bercorak *hybrid* Islam ini sebagai basis pendidikan karakter, hal-hal yang perlu dilakukan dalam hal ini antara lain : pertama, Menggalakkan kajian-kajian mengenai nilai-nilai karakter berbasis kearifan lokal orang Melayu Kalimantan Barat; kedua, Mensosialisasikan pesan-pesan moral dan nilai-nilai spiritual dalam kearifan lokal orang Melayu Kalimantan Barat; ketiga, Menspesifikasi pesan-pesan moral atau nilai-nilai spiritual dalam ragam kearifan lokal orang Melayu Kalimantan Barat sehingga menjadi nilai-nilai karakter; keempat, Merumuskan cara atau pola menginternalisasikan nilai-nilai karakter pada masyarakat melalui pengamalan kearifan lokal orang Melayu Kalimantan Barat; kelima, Menginternalisasikan nilai-nilai karakter pada masyarakat melalui ragam kearifan lokal orang Melayu Kalimantan Barat; dan keenam, Menghidupkan kembali adat istiadat dan kearifan lokal orang Melayu Kalimantan Barat, yang memiliki nilai-nilai karakter.

## **F. Penutup**

Di era globalisasi, di mana jati diri sebuah bangsa sedang diuji, membangun karakter menjadi sebuah kebutuhan. Hal ini menjadi alasan pentingnya pendidikan karakter diberikan tidak hanya di rumah atau sekolah, tetapi juga di masyarakat. Khususnya masyarakat, pada artikel ini, peneliti nilai dapat menjadi pusat pendidikan karakter oleh sebab di dalam keseharian masyarakat memiliki kearifan lokal yang dapat digali sebagai basis pendidikan karakter.

Kearifan lokal merupakan kekayaan daerah yang mengandung kebijakan hidup, dapat berfungsi untuk menuntun perilaku dalam rangka membangun kohesi dan harmoni sosial. Pada aras ini, kearifan lokal orang Melayu Kalimantan Barat yang umumnya bercorak *hybrid* Islam, seperti hukum adat Melayu, *pantang larang*, dan upacara adat Melayu, potensial untuk membangun karakter.

Signifikansinya, terutama untuk: pertama, pengembangan kebiasaan dan perilaku seseorang yang terpuji sejalan dengan nilai-nilai universal budaya dan karakter bangsa serta ajaran Islam; kedua, penanaman jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab seseorang sejalan dengan nilai-nilai universal budaya dan karakter bangsa serta ajaran Islam; ketiga, pengembangan kemampuan seseorang sebagai seseorang yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan sejalan dengan nilai-nilai universal budaya dan karakter bangsa serta ajaran Islam; dan kelima, pengembangan lingkungan masyarakat sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreatifitas dan persaudaraan sejalan dengan nilai-nilai universal budaya dan karakter bangsa serta ajaran Islam.

Untuk menggali kearifan lokal orang Melayu Kalimantan Barat yang bercorak *hybrid* Islam ini sebagai basis pendidikan karakter, hal-hal yang perlu dilakukan dalam hal ini antara lain : pertama, Menggalakkan kajian-kajian mengenai nilai-nilai karakter berbasis kearifan lokal orang Melayu Kalimantan Barat; kedua, Mensosialisasikan pesan-pesan moral dan nilai-nilai spiritual dalam kearifan lokal orang Melayu Kalimantan Barat; ketiga, Menspesifikasikan pesan-pesan moral atau nilai-nilai spiritual dalam ragam kearifan lokal orang Melayu Kalimantan Barat sehingga menjadi nilai-nilai karakter; keempat, Merumuskan cara atau pola menginternalisasikan nilai-nilai karakter pada masyarakat melalui pengamalan kearifan lokal orang Melayu Kalimantan Barat; kelima, Menginternalisasikan nilai-nilai karakter pada masyarakat melalui ragam kearifan lokal orang Melayu Kalimantan Barat; dan keenam, Menghidupkan kembali adat istiadat dan kearifan lokal orang Melayu Kalimantan Barat, yang memiliki nilai-nilai karakter.

Tentu saja dalam rangka menggali kearifan lokal, merawat, dan menjadikannya sebagai basis pendidikan karakter bukan pekerjaan mudah, karena ini membutuhkan komitmen dari berbagai pihak, terutama pemerintah dan masyarakat, khususnya orang Melayu di Kalimantan Barat. \*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Wibowo. *Manajemen Pendidikan Karakter di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Amin, Faizal. "Kitab Berladang: A Portrait of Hybrid Islam in West Kalimantan." *Studia Islamika* 20, no. 1 (30 April 2013). <https://doi.org/10.15408/sdi.v20i1.349>.
- Andi M. Akhmar, dan Syarifuddin. *Mengungkap Kearifan Lingkungan Sulawesi Selatan*. Makassar: PPLH Regional Sulawesi, Maluku dan Papua, Kementerian Lingkungan Hidup RI dan Masagena Press Makassar, 2007.
- Azizy, Ahmad Qodri A. *Melawan globalisasi: reinterpretasi ajaran Islam : persiapan SDM dan terciptanya masyarakat madani*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bagus, Lorens. *Kamus filsafat*. Ed. 1. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Darwin Darmawan. "Jangan Bakukan Aku': Identitas Hybrid Islam di Indonesia." *Kawistara* 2, no. 2 (Agustus 2012): 105–224. <https://doi.org/10.22146/kawistara.3969>.
- Deodatus S. Pradibto. "Masalah Bangsa Indonesia Berpangkal Pada Krisis Moral." *Tribun News*, Agustus 2012. [m.tribunenews.com/nasional/2012/08/19/masalah-bangsa-indonesia-berpangkal-pada-krisis-moral](http://m.tribunenews.com/nasional/2012/08/19/masalah-bangsa-indonesia-berpangkal-pada-krisis-moral).
- "Grafik Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama." Data Statistik Kependudukan Propinsi Kalimantan Barat, 2018. <https://dukcapil.kalbarprov.go.id/statistik/agama>.
- Hermansyah. *Islam dan Melayu di Borneo*. Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2015.
- Hutcheon, Pat Duffy. *Building character and culture*. Westport, Conn: Praeger, 1999.
- Ieke Sartika Iriany. "Pendidikan Karakter sebagai Upaya Revitalisasi Jati Diri Bangsa." *Jurnal Pendidikan Universitas Garut* 8, no. 1 (2014).

John M. Echols, dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2006.

“Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Barat Menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Kelamin, Sensus Penduduk 2010.” Badan Pusat Statistik Propinsi Kalimantan Barat, 2010. <https://kalbar.bps.go.id/stactictable/2018/02/26/125/jumlah-penduduk-provinsi-kalimantan-barat-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin-sensus-penduduk-2010.html>.

“Kalimantan Barat.” Seasite NIU, 2018. <http://www.seasite.niu.edu/indonesian/indonesian-map/kalbar/kalbar.htm>.

Kurniawan, Syamsul. “Pantang Larang And The Environmental Wisdom Of Sambasness Malay In The Sepinggian Village.” *KALAM* 12, no. 1 (3 Juli 2018): 87. <https://doi.org/10.24042/klm.v12i1.1882>.

———. “Pantang Larang in The Sepinggian Village Muslim Community from The Perspective of Character Education.” *Ta'dib* 21, no. 2 (31 Desember 2016): 113. <https://doi.org/10.19109/td.v21i2.771>.

Lickona, Thomas. *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books, 2009. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=721446>.

“Mengerikan! Dampak Negatif Menghirup Lem, Gagal Jantung hingga Mati Lemas,” Nopember 2017. <https://lifestyle.okezone.com/read/2017/11/06/481/1809287/mengerikan-dampak-negatif-menghirup-lem-gagal-jantung-hingga-mati-lemas>.

Moh. Haitami Salim. *Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Upacara Adat Melayu Pontianak*. Pontianak: STAIN Pontianak Press, 2013.

“Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian

- dan Pengembangan Budaya Daerah.” Kementerian Dalam Negeri, Agustus 2007.
- Piliang, Yasraf Amir, dan Yasraf Amir Piliang. *Dunia yang dilipat: tamasya melampaui batas-batas kebudayaan*. Ed. 3, cet. 1. Bandung: Matahari, 2011.
- Rasmussen, Anne K. *Women, the recited Qur'an, and Islamic music in Indonesia*. Berkeley: University of California Press, 2010.
- Retno Listyarti. *Pendidikan Karakter dalam Metode Aktif, Inovatif dan Kreatif*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Samrin. “Pendidikan Karakter (Sebuah Pendekatan Nilai).” *Jurnal Al-Ta'dib* 9, no. 1 (Juni 2016).
- Sonny Keraf. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Syahirul Alim. “Peran Ulama Nusantara dalam Akulturasi Islam,” Oktober 2017. <https://indonesiana.tempo.co/read/117485/2017/10/04/Peran-Ulama-Nusantara-dalam-Akulturasi-Islam>.
- Syamsu Yusuf L.N., dan Nani M. Sugandhi. *Perkembangan Peserta Didik*. 7 ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Syamsul Kurniawan. *Pendidikan Karakter: Konsepsi & Implementasinya Secara Terpadu di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2004.
- Wardoyo, Sigit Mangun. “Pendidikan Karakter: Membangun Jatidiri Bangsa Menuju Generasi Emas 2045 Yang Religius.” *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 1 (5 November 2015): 90. <https://doi.org/10.19105/jpi.v10i1.640>.
- Yusriadi, dan Hermansyah. “Alam Melayu dan Masyarakat Embau.” Dalam *Orang Embau: Potret Masyarakat Pedalaman*

*Kalimantan*. Pontianak: STAIN Pontianak Press, Yayasan Adikarya IKAPI, dan The Ford Foundation, 2003.

**(Footnotes)**

- 1 “Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Barat Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Sensus Penduduk 2010,” Badan Pusat Statistik Propinsi Kalimantan Barat, 2010, <https://kalbar.bps.go.id/statictable/2018/02/26/125/jumlah-penduduk-provinsi-kalimantan-barat-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin-sensus-penduduk-2010.html>.